

KEKUATAN SOSIALISASI DALAM PARADIPLOMASI KEDAULATAN BANGSA KURDI DI TIMUR TENGAH

Gita Karisma^{1*}, Moh. Nizar², Indra Jaya Wiranata³ & Sonya Mumtaz⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: gita.karisma@fisip.unila.ac.id

Received: 27/2/2024 | Revised: 5/6/2024 | Accepted: 10/6/2024

Abstract

While the trend of cooperation on the globalization era is rising, the cities involvement on the diplomatic activities is increasing. The central government also encourages the paradiplomacy considering the benefits that will return to its state. However, recently, paradiplomacy has also been carried out not only to pursue the economic interests and development aspects but also to fight for security, identity, and sovereignty aspect. Several cities and even autonomous regions have shown the ability to implement and develop their paradiplomacy. This article using qualitative approach to examine sovereign paradiplomacy of the Kurdistan Regional Government (KRG) which was established as an autonomy region within Iraq. The KRG has long demanded for independence and has even been able to expand its paradiplomacy to the Middle East and the world. The KRG's paradiplomacy is successful and strong enough which is can be seen when referendum was be held by KRG in 2017. The KRG has the power of socialization and shared the values as a form of construction that the KRG has carried out for a long time on its paradiplomacy. The KRG has repeatedly stated that the KRG's paradiplomacy is constitutionally valid. Though, KRG always shows a cooperative attitude and expertise in diplomacy. He was even able to show the similarity of the values of the Kurdish identity and the identity of anti-terrorism and democracy as the basis for cooperation, even the values that became the basis for the acceptance of Kurdish paradiplomacy by countries in the Middle East.

1

Keywords: KRG, Kurdi, paradiplomacy, sovereign paradiplomacy, protodiplomacy

Abstrak

Keterlibatan kota dalam praktik diplomasi semakin tidak dapat dihindari terutama seiring trend globalisasi dan perkembangan ekonomi kota di dunia. Pemerintah pusat juga mendorong kemandirian paradiplomasi kota seiring dengan manfaat yang juga akan kembali kepada negara. Meski begitu, paradiplomasi nyatanya juga telah dilakukan tidak semata untuk mengejar kepentingan kota atas aspek ekonomi dan pembangunan. Beberapa kota bahkan wilayah otonomi menunjukkan kemampuan melaksanakan dan mengembangkan paradiplomasi, termasuk Kurdistan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus melihat paradiplomasi kedaulatan Kurdistan atau *Kurdistan Regional Government* (KRG) sebagai wilayah otonomi di wilayah Irak. KRG telah sejak lama menuntut kemerdekaan bahkan mampu memperluas paradiplomasi ke Timur Tengah dan banyak negara di dunia. Paradiplomasi KRG dapat dikatakan berhasil dan kuat hingga ia mampu menyelenggarakan referendum pada 2017. KRG memiliki kekuatan sosialisasi dan kesamaan nilai sebagai bentuk konstruksi yang dilakukan KRG sejak lama dalam paradiplomasi. KRG kerap menyampaikan secara berulang bahwa paradiplomasi KRG sah secara konstitusi. KRG juga senantiasa menunjukkan sikap kooperatif dan kepiawaian dalam diplomasi. Ia bahkan mampu menunjukkan kesamaan nilai identitas bangsa Kurdi dan identitas anti terorisme dan nilai demokrasi sebagai landasan kerjasama, bahkan nilai ini juga yang salah satunya telah menjadi dasar diterimanya paradiplomasi Kurdi oleh negara-negara di Timur Tengah.

Kata kunci: KRG, Kurdi, paradiplomasi, kedaulatan, protodiplomasi

PENDAHULUAN

Irak menjadi salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di Timur Tengah dengan sumber terbesar berasal dari negara bagiannya yaitu Kurdistan atau Sulaimaniyah. Menurut kementerian Sumber Daya Alam (SDA) *Kurdistan Regional Government* (KRG), pada Januari 2016 wilayah ini dapat mengekspor sebanyak 18.656.131 barel minyak mentah, atau rata-rata 601.811 barel per hari (Salih, 2016). Sedangkan menurut survey geologi Amerika Serikat, Kurdistan mampu menampung lebih dari 45 miliar barel minyak dan 60 triliun tof cadangan gas, dan posisi ini diperkirakan akan

menempatkan Kudistan pada sepuluh negara bagian teratas di dunia, dengan cadangan hidrokarbon terbesar (Salih, 2016). Hal tersebut membuat pendapatan mereka menjadi 25% lebih tinggi dari pada wilayah lain di Irak.

Hal menarik dibalik fakta kekayaan tersebut, daerah Kurdistan hingga saat ini mengalami hubungan pasang surut dengan pemerintah pusat yang berkaitan dengan kehendak pemisahan wilayah oleh KRG. Pada 25 September 2017, KRG melangsungkan referendum namun hingga saat ini belum ada resolusi final atas hubungan Irak dan KRG.

Ada kecendrungan Sumber Daya Alam telah digunakan oleh Kurdistan untuk mencapai kepentingannya, salah satunya dengan menjalankan paradiplomasi dan memperluas kerja sama perdagangan minyak ke lebih dari 50 negara serta perusahaan multinasional. Kerjasama Kurdistan ini dijalin dengan beberapa negara di Timur Tengah seperti seperti Amerika, Inggris, Korea Selatan, Perancis, Uni Emirat, Qatar dan berbagai perusahaan minyak serta beberapa organisasi internasional. Kerja sama ini bahkan juga meluas ke bidang lain seperti bidang pendidikan infrastruktur, pariwisata, pertanian, transportasi dan lain-lain (Salih, 2016). Paradiplomasi yang dijalankan oleh Kurdistan dipandang mengarah pada bentuk protodiplomasi, yaitu saat diplomasi dijalankan dengan intensi yang memang berkenaan dengan pengakuan dan keinginan meraih kemerdekaan (Ababakr, 2020).

Sejak lama etnis Kurdi yang mendiami sebagian besar wilayah Kurdistan, serta minoritas di wilayah Turki, Iran dan Suriah telah menginginkan kemerdekaan bahkan bangsa Kurdi ini mendapat beberapa dukungan eksternal karena kedekatan KRG dengan berbagai pihak karena paradiplomasi. Berbagai penelitian telah banyak membahas mengenai keberhasilan paradiplomasi Kurdi yang mengedepankan kekuatan minyak sebagai bentuk *sovereign paradiplomacy* (Ababakr, 2020; Abbas Zadeh & Kirmanj, 2017). Meskipun beberapa negara terutama Irak masih tidak setuju dengan kemerdekaan etnis Kurdi, sebagian negara lainnya termasuk Amerika justru mendukung kemerdekaan tersebut (Salih, 2016). Keberhasilan paradiplomasi ini tentunya tidak dilihat hanya dari sisi Kurdistan melainkan juga ditentukan dari kehendak negara lain untuk bekerjasama atau sebaliknya. Paradiplomasi Kurdistan diterima dengan baik oleh negara negara tetangganya. Oleh karenanya menarik melihat bagaimana Kurdistan menjalankan *sovereign paradiplomasi* di Timur Tengah. Kekuatan Kurdistan salah satunya dapat dilihat dari sosialisasi keabsahan hukum paradiplomasi Kurdi yang sering dijadikan alasan utama KRG dalam mengembangkan paradiplomasi. Disamping menjelaskan kekuatan sosialisasi paradiplomasi Kurdi di Timur Tengah, artikel ini juga melihat alasan seperti kesamaan nilai dan ide yang di bawa oleh Kurdistan dalam aktifitas *sovereign paradiplomasi* nya di Timur Tengah.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus digunakan untuk melihat interaksi pemerintah lokal Kurdistan dengan dunia internasional. Kurdistan merupakan wilayah otonom di Irak yang awalnya melakukan gerilya dan terlibat konflik dengan pemerintahan pusat kemudian beralih menjalankan politik paradiplomasi yang bertujuan pada pembangunan negara baru yang merdeka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran studi pustaka untuk memperoleh berbagai data terkait dari kekuatan sosialisasi dan kesamaan nilai yang dijalankan Kurdistan dalam paradiplomasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradiplomasi dan Sovereign Paradiplomacy

Konsep paradiplomasi pertama kali muncul pada tahun 1980-an, yang dibawa oleh Ivo Duchacek dan Payanotis Soldatos. Panayotis Soldatos (1990) melekatkan kata 'paradiplomasi' dengan berbagai awalan (seperti global atau regional). Berbagai sebutan terdahulu paradiplomasi meliputi diplomasi konstituen, diplomasi berlapis, diplomasi katalitik, hubungan pascadiplomasi, diplomasi plurinasional. Panayotis Soldatos (1990) melekatkan kata 'paradiplomasi' dengan berbagai awalan (seperti global atau regional). Sementara Duchacek memilih menggunakan 'mikro-diplomasi' Duchacek (lihat, misalnya, Rutan 1988; Lubin 2003/2004), yang lain mempertanyakan istilah 'paradiplomasi', sebagai gantinya menyarankan 'transgovernmentalisme teritorial' (Feldman

dan Feldman 1988), 'diplomasi konstituen'. ' (Kincaid 1990), 'diplomasi berlapis-lapis' (Hocking 1993), 'diplomasi katalitik' (Hocking 1996), 'hubungan pascadiplomasi' (Aguirre 1999) dan 'diplomasi plurinasional' (Aldecoa 1999) (Tubilewicz & Omond, 2021, hlm. 3).

Kemudian nama paradiplomasi mulai dibawa kembali oleh Neo Cornago dan Alexander Noe Cornago (1999), André Lecours (2002a, 2002b, 2008), Alexander Kuznetsov (2015) and Rodrigo Tavares (2016), yang berpendapat bahwa awalan 'para' tidak perlu menunjukkan dimensi paralel atau anak dari hubungan luar negeri, melainkan bahwa hubungan luar negeri subnasional dapat berjalan paralel dengan hubungan luar negeri pemerintah pusat, sehingga memainkan peran tambahan. Namun, mereka mungkin juga menentang kebijakan luar negeri pemerintah nasional, baik memaksa otoritas pusat untuk mengambil posisi dalam isu-isu internasional yang tidak akan mereka ambil atau memprovokasi tindakan hukum atau administratif pemerintah pusat (Tubilewicz & Omond, 2021, hlm. 4). Definisi ini tidak mengandaikan cakupan geografis atau tematik paradiplomasi, maupun tujuan yang dikejar dan instrumen yang digunakan oleh entitas subnasional. Ini juga tidak mencerminkan hubungan antara aktor subnasional dan nasional. Paradiplomasi adalah sekumpulan praktik dan instrumen khusus yang dikembangkan dan dijalankan oleh banyak aktor subnasional, masing-masing berusaha untuk mewakili pemerintahan subnasional tertentu ke dunia luar untuk mencapai tujuan khususnya (Mingus, 2006, hlm. 5).

Keterlibatan provinsi di satu sisi sangat bermanfaat dalam aspek ekonomi dan perdagangan, namun muncul kekhawatiran terhadap pemberontakan sipil. Pemerintah daerah dapat memberikan pendapat mereka namun harus tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan federal. Pemerintah daerah juga memainkan sejumlah peran penting dalam negosiasi internasional, Misalnya, negara bagian memberikan informasi yang berguna dari daerah kepada pemerintah pusat selama negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada-Amerika Serikat. Juga, isu-isu politik yang sensitif seringkali dapat didefinisikan ulang menjadi istilah administratif oleh badan-badan subnasional untuk mengurangi tekanan eksternal (Mingus, 2006, hlm. 581).

3

Isu daerah sebagai aktor internasional sangat sensitif bagi negara karena melibatkan tantangan lain terhadap kedaulatan mereka dan dipandang sebagai masalah untuk artikulasi kebijakan luar negeri nasional yang koheren. (Lecours, 2002, hlm.95). Paradiplomasi dianggap sebagai kegiatan normal, yang mencerminkan tingkat otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, sedangkan protodiplomasi sering dianggap tidak sah atau setidaknya berbahaya bagi integritas negara (Tavares, 2016, hlm. 32). *Sovereign paradiplomacy* dekat dengan protodiplomasi, perbedaan keduanya ada pada maksud dan tujuan yang berorientasi pada kemerdekaan. Tidak semua kegiatan subnasional yang berkaitan dengan kedaulatan itu bersifat ilegal atau tanpa pengakuan negara dan pemerintah pusat terkait. Protodiplomasi mengacu pada penggunaan yang disengaja oleh wilayah tersebut untuk mendapatkan pengakuan yang lebih internasional dan untuk meningkatkan legitimasi internasional, identitas, dan status wilayah tersebut dengan tujuan akhirnya memperoleh kemerdekaan dari negara pusat (Ababakr, 2020).

Beberapa faktor di antaranya yang mendorong beberapa daerah untuk mengembangkan paradiplomasinya menjadi protodiplomasi berkaitan erat dengan nasionalisme, variabel struktural internal dan variabel eksternal, seperti saling ketergantungan dan tingkat kompleksitas sistem internasional serta dukungan eksternal, serta globalisasi (Ababakr, 2020). Keinginan membentuk negara Kurdi merdeka bangsa Kurdi merupakan impian bersejarah yang didukung oleh beberapa pertimbangan, yang terpenting adalah nasionalisme yang tinggi, kebanggaan yang tinggi terhadap identitas dan budaya Kurdi serta kekhasannya dari yang lain (Ababakr, 2020).

Konstruktivisme dan Paradiplomasi

Konstruktivisme percaya bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh intersubjektifitas struktur ketimbang kapasitas material, dan aktifitas negara adalah bentuk konstruksi identitas. Paradiplomasi menarik untuk dilihat dalam perspektif konstruktifis terutama dalam konteks mengejar *sovereign statehood* dan bukan sebagai respon interdependensi atau globalisasi semata (Schiavon, 2019).

Menurut Wendt, para aktor termasuk *state province* dan negara dipaksa untuk mengikuti logika kemajuan dan secara bertahap menginternalisasi norma-norma baru. Realitas memaksa aktor untuk mengenali mekanisme kausal (homogenitas, nasib bersama, saling ketergantungan) yang 'mendorong' mereka ke arah bentuk budaya yang lebih tinggi dengan mendorong mereka untuk mempraktikkan pengendalian diri dalam hubungan mereka (Wendt, 1999:355). Wendt mengasumsikan tiga penyebab aktif (atau efisien) dalam perubahan struktural yaitu, saling ketergantungan, homogenitas, dan nasib bersama (Wendt, 1999:343, 357).

Perdamaian adalah tantangan utama diplomasi di bawah bentuk budaya apa pun, dan, oleh karena itu, redefinisi damai dari legitimasi politik membutuhkan *creative diplomacy* (Guzzini & Leander, t.t., hlm. 168) namun ketika diplomasi gagal, perubahan seringkali mengarah pada gagalnya perdamaian namun berdampak pada potensi konflik dan kekerasan atas nama konsep legitimasi. Paradiplomasi yang dilakukan KRG disatu sisi merupakan bentuk menciptakan perdamaian namun disisi lain sebenarnya sedikit memperkeruh konflik antara KRG dengan pemerintah pusat Irak. Wendt menemukan sumber konflik dalam sifat manusia, yang menjelaskan sifat anarkis sistem internasional, meski ada kemajuan menuju kerjasama dalam penggunaan kekerasan yang sah. Meskipun begitu, Wendt juga mengakui sifat dan kekuatan legitimasi, yang menjelaskan mengapa *local attractors* seperti negara atau budaya anarki yang berbeda dapat stabil, meski hanya sementara, sejalan dengan sulitnya perubahan antara *local attractors* berpindah ke prinsip baru (Guzzini & Leander, t.t., hlm. 174).

Bangsa Kurdi memiliki budaya yang berbeda dari Irak yang penduduknya di didominasi Bangsa Arab. Kurdi merupakan salah satu penduduk asli daratan Mesopotamia yang memiliki identitas dengan ras, budaya dan Bahasa yang berbeda dengan Arab dan Irak. Etnis ini tersebar dan membentuk komunitas transnasional yang tersebar di Irak utara, dataran tinggi di Turki bagian tenggara, Suriah barat laut, Iran barat laut dan barat daya Armenia. Budaya ini membentuk identitas dan identitas adalah pusat untuk membentuk preferensi, strategi, dan rasa apa yang pantas dan sah dalam penggunaan kekuatan (Williams, 2013). Selain itu dalam aktifitas kerjasamanya Kurdi dapat menawarkan wacana baru pada saat krisis, membuatnya lebih persuasif daripada sebelumnya. Aturan dan prosedur baru ini dapat mengubah pandangan dunia orang. Sebagaimana aktor dan institusi bukanlah entitas yang terpisah karena mereka dibentuk satu sama lain. Aturan aturan informal dan birokrasi formal menciptakan kerangka makna di mana orang berpikir dan bertindak dan tindakan anggota di dalamnya pada gilirannya, dapat mendukung atau menentang wacana dominan ini.

Ketidakterpisahan yang melekat pada bahasa, praktik, identitas, dan institusi ini menghadirkan tantangan untuk meneliti hubungan antara struktur dan agensi. Proses konstitutif, seperti sosialisasi, mempengaruhi pemimpin nasional, pemerintah, gerakan sosial, kelas, orang-orang yang berjenis kelamin, perusahaan, dan organisasi antar pemerintah pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda (Klotz & Lynch, 2007, hlm. 43–45). Inilah yang dilakukan Kurdi terus menerus melakukan sosialisasi atas identitas mereka yang diwacanakan untuk mendukung keberhasilan paradiplomasi.

Sejarah Bangsa Kurdi

Suku Kurdi sendiri merupakan suku yang diketahui tinggal di beberapa negara di Timur Tengah, yaitu Irak, Iran, Turki dan sebagian wilayah Suriah. Kurdi sebagai etnis yang menempati wilayah Timur Tengah, tidak seperti kebanyakan etnis Arab yang menggunakan bahasa arab, etnis Kurdi menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa kurdi. Suku Kurdi berasal dari kelompok etnis Indo-Eropa yang kebanyakan menganut agama Islam Sunni dan tinggalnya di wilayah yang dinamakan Kurdistan atau tanah orang-orang Kurdi. Kurdi tepatnya meninggal Turki bagian tenggara, Iran Utara, Irak Utara, Suriah Utara dan ada yang masuk ke wilayah Soviet Selatan yang tidak masuk ke wilayah Timur Tengah (Sahide, 2013).

Awal lahirnya gerakan etnosionalisme Kurdi di negara Irak adalah ketika munculnya perjanjian Sykes- Picott yang dilakukan oleh dua negara yaitu Perancis dan Inggris. Perjanjian ini membagi daerah yang ada di Mesopotamia dan dikarenakan pembagian ini etnis Kurdi menjadi terpecah

secara geografis dengan jumlah terbanyak di Irak, Iran dan Turki dan sebagian kecil lagi di Suriah Utara dan Soviet Selatan. Sejak itu, Kurdi melakukan gerakan nasionalisme di Irak. Perlawanan ini ditujukan untuk Inggris agar meratifikasi perjanjian Sevres. Permintaan Kurdi saat itu adalah meresmikan Kurdistan sebagai satu negara, namun tidak diratifikasi oleh Inggris dikarenakan Kurdistan memiliki sumber daya alam yang melimpah (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013).

Setelah kepergian Inggris dari Irak, monarki Irak berdiri secara mandiri, seperti Inggris, Irak tidak bisa menunjang kepentingan Kurdi dengan baik. Padahal sebelumnya ada perjanjian antara Kurdi dan Inggris dimana yang dianggap penting menjalankan pemerintahan yang baru salah satunya adalah Irak, dan secara otomatis Irak akan diberikan wilayah atau otonomi khusus. Saat Irak menjadi monarki, Irak tidak dapat mengabdikan keinginan Kurdi yang dianggap memaksa untuk diberikan wilayah Kirkuk yang pada saat itu menjadi wilayah minyak. Setelah Irak menjadi rezim Republik muncul pemberontakan tiada henti dari Kurdi ke Irak dengan permintaan yang sama yaitu diberikan wilayah minyak Kirkuk. Pada Maret 1970 mereka membuat perjanjian, namun gagal dan pemberontakan kembali muncul. Pada akhirnya Kurdi Irak membentuk identitas baru untuk melawan rezim (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013). Pemberontakan Kurdi di Irak muncul kembali pada tahun 1983 yang menjadi penyebab adalah Perang Teluk Pertama antara Irak dan Iran, dimana Irak dianggap lemah posisinya sehingga Kurdi memanfaatkan hal tersebut. Kemudian tahun 1991, pemberontakan kembali dimulai saat melawan rezim Saddam Hussein, hal ini dilakukan karena Irak sedang mengalami ketidakstabilan politik akibat invasi Irak ke Kuwait. Sebelumnya, pada sekitar tahun 1986-1989, rezim Saddam juga telah melakukan operasi Anfal yang ditengarai menyebabkan genosida terhadap etnis Kurdi di Irak Utara, bahkan menyebabkan hancurnya 4.500 desa Kurdi dan 31 desa Asyur, dan menemukan fakta bahwa pada tahun 1988, 17.000 orang telah menghilang (Assri, 2021). Tahun 1994, Kurdi Irak menghadapi perang saudara Kurdi dikarenakan permasalahan ekonomi, dan juga Kurdi Irak mengalami *double hit* embargo oleh Baghdad dan Irak yang akan membahayakan visa mereka yang pada saat itu baru saja mendapatkan wilayah otonomi karena adanya resolusi 688 oleh PBB.

Pada tahun 2003, Kurdi Irak mengambil kesempatan dengan membuka wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika yang tujuannya untuk menggulingkan Saddam Hussein. Hingga pada tahun 2005, Kurdi Irak berhasil mengesahkan konstitusi daerah yang menjadikan Kurdi sebagai wilayah otonomi Kurdi Irak atau *Kurdistan Regional Government (KRG)* (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013). Saat ini KRG telah diakui secara internasional sebagai entitas federal Irak. Adalah Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Turki kemudian mendorong rencana kemanusiaan kolektif, memberlakukan zona larangan terbang di wilayah Kurdi dan memberlakukan *no fly zone* yang mencegah angkatan udara Irak beroperasi di area Irak Utara.

Seperti yang digambarkan sebelumnya bahwa konflik etnis Kurdi ini berlangsung cukup lama, dimana selain menghadapi rezim penguasa negara-negara yang mereka tinggali, contohnya Irak, mereka juga terlibat dengan perang saudara dengan sesama Kurdi. Dan di Turki sendiri banyak orang Kurdi yang menjadi korban maupun di deportasi terutama sebagai akibat pemberontakan pada tahun 1925, 1930, dan 1937. Di Iran, Kurdi berhasil merebut wilayah Kurdistan Selatan. Kurdi dikenal sebagai etnis yang sering memicu masalah terutama berkaitan dengan gerakan separatisme yang dilakukan oleh Kurdi yang menginginkan negara baru bagi bangsanya (Sahide, 2013).

Suku Kurdi memiliki peranan penting dalam sejarah politik Timur Tengah, meskipun bangsa ini kurang beruntung dan juga bukan termasuk kedalam etnis Arab. Dikatakan kurang beruntung karena bangsa Kurdi selalu terintimidasi akibat karakter geografisnya, sentimen tribalisme, tirani bahkan korban kolonialisme. Selain itu juga, suku Kurdi menempati kasta kelas paling bawah dalam keberagaman masyarakat Arab, sering kali hak-hak mereka diabaikan dan kematian menjadi suatu pilihan (Sahide, 2013).

Keberhasilan KRG pada tahun 2005 dalam rangka memenangkan pengesahan daerah otonomi Kurdi Irak, menyebabkan Kurdi mulai membuka diri pada dunia internasional, dimana suku Kurdi menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan tujuannya untuk mendapatkan negara bagi dirinya apabila konflik tidak terselesaikan. Oleh karena itu, suku Kurdi membangun nasionalisme melalui sistem edukasi dan mengembangkan potensi lainnya serta membuka investasi, dan pengembangan wilayah dilakukan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan dan diplomasi.

Paradiplomasi Kurdistan

Sejak disahkannya konstitusi Irak ditahun 2005, peran bangsa Kurdistan dalam hubungan internasional semakin terlihat. Konstitusi tersebut menekankan bahwa hubungan internasional, termasuk perumusan kebijakan luar negeri dan perwakilan diplomatik serta negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi perjanjian internasional, adalah eksklusif untuk pemerintah federal. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan internasional yang diidentifikasi oleh konstitusi sebagai hak "eksklusif federal" mencakup urusan rumah, pertahanan maritim dan darat, perbatasan, penerbangan sipil dan sumber air dari luar kebijakan irak, kebijakan fiskal dan moneter. Menurut artikel 110, pemerintah federal harus memiliki otoritas eksklusif dalam hal-hal berikut: merumuskan kebijakan luar negeri dan representasi diplomatik, negosiasi, dan penandatanganan perjanjian internasional; Menegosiasikan, menandatangani, dan meratifikasi kebijakan utang dan merumuskan kebijakan ekonomi dan perdagangan berdaulat. Oleh karena itu, kawasan Kurdistan merupakan satu-satunya wilayah federal yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi dan saat ini merupakan satu-satunya wilayah, yang memiliki karakter internasional yang dapat menolak untuk menerapkan, dalam istilah hukum, perjanjian internasional apa pun yang tidak dikehendaki (Salih, 2006).

Konstitusi Irak 2005 juga menegaskan bahwa Kurdistan diberikan yurisdiksi terhadap hal-hal seperti kebijakan lingkungan hidup, imigrasi, listrik, kebiasaan daerah, kesehatan masyarakat, kebijakan pendidikan dan pembangunan, serta pengembangan minyak dan gas. Sejak disahkannya konstitusi Irak yang baru tersebut, bangsa Kurdistan lebih leluasa dalam menjalankan kepentingannya dalam hubungan internasional. Hal tersebut didukung dengan pasal-pasal yang memperbolehkan Kurdistan untuk melakukan hubungan luar negeri, pasal-pasal tersebut seperti pada pasal 117 dari konstitusi Irak yang menetapkan Kurdistan sebagai wilayah federal, hal itu dapat mempraktikkan hubungan asing dan terlibat dalam hubungan internasional. Selain itu, pada pasal 110 mengidentifikasi kekuasaan eksklusif pemerintah federal serta pada articlele 21/4, pemerintah memberikan hak kepada kawasan-kawasan untuk mendirikan kantor-kantor dalam misi diplomatik dan kedutaan besar untuk mengikuti kegiatan sosial, budaya, dan perkembangan. Menurut pasal 142 yang berisi "konstitusi baru warga irak mengakui majelis nasional Kurdistan, pemerintahan dan wilayah, dan semua hukum dan kontrak wilayah sejak 1992. Lembaga ini memberi hak kepada majelis nasional Kurdistan otonomi penuh di seluruh kawasan, kecuali sejumlah kecil kekuasaan pemerintah Federal yang eksklusif dan terbatas, dan hak untuk meniadakan atau memodifikasi undang-undang Federal mana pun di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah Federal dan regional". Dengan demikian wilayah Kurdistan dapat dengan leluasa melakukan praktik diplomasi dengan negara asing (Dauli, hlm.5).

Kawasan Kurdistan memiliki layanan paradiplomasi yang sesungguhnya, lengkap dengan menterinya sendiri, Korps pejabat khusus dalam hubungan internasional, dan jaringan perwakilan asing. Pada tahun 2006, departemen hubungan luar negeri (DFR) disusun pada model yang sama dengan departemen luar negeri federal yang terdiri atas tujuh direktor meliputi kantor KRG di luar negeri, protokol dan delegasi, administrasi dan keuangan, urusan hukum, organisasi internasional, dan hubungan internasional di wilayah tersebut, masing- masing dengan setidaknya dua bagian. Kepala departemen memiliki pangkat menteri dan, dalam semua maksud dan tujuan, adalah menteri luar negeri daerah.

Paradiplomasi Kurdistan menjadi salah satu contoh dari *sovereign* paradiplomasi paling berkembang. KRG cenderung berhasil dalam melancarkan diplomasi minyaknya. Kerjasama KRG umumnya adalah pada sektor perdagangan minyak. Mitra terbesar adalah Turki, Amerika dan Inggris. Beberapa aktifitas paradiplomasi KRG diantaranya, adalah hadir dan berpartisipasi pada beragam forum internasional. KRG kerap kali diundang oleh para menteri di negara lain, untuk berpartisipasi di berbagai konferensi dan forum perekonomian internasional, seperti salah satunya *World Economic Forum Middle East and Africa*. KRG juga cukup sering diundang oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk membahas masalah keamanan global bahkan KRG juga menjadi mitra Amerika, Inggris, Perancis, Italia, Kanada dan Australia dalam agenda memerangi ISIS (Sherko, 2017).

Eksistensi pemerintahan Kurdistan cukup diakui salah satunya ketika KRG dipercaya beberapa kali menjadi tuan rumah dalam berbagai kunjungan diplomatik dari berbagai negara. KRG selain itu juga telah menjadi tempat dari 33 konsulat umum, kantor kedutaan, kantor konsuler, kantor komersial dan konsulat jenderal kehormatan dari berbagai negara termasuk lima negara tetap PBB. Konsulat umum KRG juga berada di Republik Islam Iran, Federasi Rusia, Republik Turki, Republik Persatuan Amerika, Persatuan negara-negara Hashemit, Republik Arab Mesir, Otoritas Nasional Palestina, Republik Ceko, Republik Hungaria, Kerajaan Belanda, negara bagian Kuwait dan jenderal konsulat Inggris. Adapun kantor kedutaan yang ada di Republik Korea, Kerajaan Swedia, dan Republik Polandia serta kantor-kantor konsulat yang ada di Republik Italia, Uni Emirat Arab, Rumania, Republik Austria, Republik Bulgaria dan Republik Helenik (Yunani). KRG juga memiliki kantor-kantor komersial seperti lembaga kerja sama internasional Jepang (JICA), *Korea Cooperation Agency* (KOICA), kantor perwakilan Regional UNAMI, dan kantor Regional ICRC serta para konsul yang terhormat seperti Kerajaan Spanyol, Jepang, Kerajaan Denmark, Republik Slovakia, dan Republik Federal Brasil.

KRG juga menjalin perjanjian internasional sebagai cara untuk mempromosikan kepentingan kawasannya. Sejak 2006, kawasan Kurdistan telah membuat kesepakatan dengan negara-negara seperti Korea selatan, Jerman, Prancis, Arab, Yordania, Qatar, Mesir, Lebanon, Iran dan Turki, serta perusahaan multinasional dan organisasi internasional (seperti UNESCO). Selain itu, perjanjian ini berkaitan dengan beberapa bidang perdagangan, pariwisata, infrastruktur, pendidikan, pertanian, transportasi, minyak dan gas. Dengan begitu banyaknya kegiatan politik luar negerinya, yang terpenting Kurdistan juga melakukan beberapa kegiatan paradiplomasi dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti dengan Irak, Turki, Iran dan juga Suriah. Beberapa paradiplomasi yang dilakukan dengan negara di Timur Tengah sebagai berikut:

Konstitusi sebagai Justifikasi Keabsahan Sovereign Paradiplomacy Kurdistan

Sejak awal periode pasca-Saddam, orang Kurdi telah menuntut parlemen Irak untuk melakukan jaminan atas keamanan ekonomi, politik, budaya dan fisik mereka sebagai kelompok dan sebagai individu. Selain itu, sebelum runtuhnya rezim Saddam Husein, orang Kurdi juga telah memiliki lebih banyak hak nasional di Irak dibandingkan dengan negara tuan rumah lainnya. Pada tahun 1931, pemerintah Irak sebelumnya mengizinkan bahasa Kurdi digunakan dalam pendidikan, pada tahun 1958, kewarganegaraan Kurdi diakui, dan pada tahun 1971, otonomi terbatas Kurdi diterapkan di bawah pemerintahan Partai Baath (Dana dan Bakhan, 2016). Selama tahun 1990-an, invasi atas Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat setelah serangan Kuwait membuka banyak jalan bagi otonomi Kurdi. Setelah militer Irak menekan pemberontakan Kurdi pasca-perang awal, Amerika Serikat dan pasukan sekutu pada pertengahan 1991 melembagakan 'zona larangan terbang' di atas Wilayah Kurdistan. Hal ini bertujuan untuk melindungi Kurdi dari pasukan militer Irak (Dana dan Bakhan, 2016).

Pada tahun 1991, para pemimpin Kurdi bergabung dengan Kongres Nasional Irak (INC), yang sebuah kelompok oposisi yang didukung oleh AS, dan telah mendapatkan izin untuk beroperasi di wilayah Kurdistan. Pada 19 Mei 1992, Wilayah Kurdistan mengadakan pemilihan untuk parlemen sementara yang beranggotakan 105 orang. Partai Demokrat Kurdistan (KDP) dan Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) masing-masing memperoleh 50 kursi. Tanpa adanya pemenang yang jelas dalam pemilihan presiden tersebut, kedua partai utama akhirnya sepakat untuk menjalankan roda pemerintahan bersama - sama. Pada Oktober 1992, Parlemen Kurdi menyerukan „ the creation of a Federated State of Kurdistan in the liberated part of the country „, akan tetapi, parlemen Kurdi menambahkan bahwa meskipun demikian, Kurdi akan tetap berkomitmen untuk tetap pada integritas teritorial Irak. Namun, pernyataan ini nyatanya tidak cukup untuk menghilangkan ketakutan di antara para pemimpin Irak bahwa Kurdi akan mendorong kemerdekaan penuh suatu hari nanti (Dana dan Bakhan, 2016).

Keterlibatan wilayah Kurdistan dalam urusan luar negeri, yang juga disebut sebagai paradiplomasi, bukanlah suatu fenomena baru. Hal ini dapat ditelusuri kembali sejak abad ke-20, khususnya di bawah kepemimpinan Mullah Mustafa Barzani, ketika ia memimpin gerakan pemberontak Kurdistan dan membina hubungan dengan Iran dan AS pada 1970-an. Namun, pada

tahun 1991, paradiplomasi Kurdistan menerima lebih banyak dorongan ketika wilayah tersebut mendapatkan otonomi setelah invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Kemudian sejak penyatuan KRG pada tahun 2006, para pemimpin Wilayah Kurdistan telah mengubah prinsip diplomasi KRG atau Kurdistan menjadi "mempromosikan Kurdistan" di pentas dunia (el Dessouki, 2015: 1).

Meningkatnya paradiplomasi wilayah Kurdistan setelah tahun 2003 bertepatan dengan penggulingan rezim Saddam Husein, Wilayah Kurdistan telah memperoleh lebih banyak otonomi dari pemerintah Baghdad dan telah aktif dalam membangun kembali negara tersebut. Akibatnya, Wilayah Kurdistan dapat dianggap sebagai salah satu kisah sukses Timur Tengah karena berhasil membantu membangun Irak pasca invasi Amerika Serikat (Dana dan Bakhan, 2016).

Menanggapi peran aktif Kurdistan dalam paradiplomasi, sebagian besar pemimpin Kurdi setuju bahwa status KRG telah dijamin dan sudah memiliki landasan hukum secara konstitusional. Selain itu, mereka menyatakan bahwa KRG telah diberikan kekuasaan yang sah untuk melaksanakan hubungan internasional tetapi dengan catatan tidak untuk merumuskan urusan luar negeri. Selain itu, mengenai pembatasan konstitusional, semua profesional Kurdi dalam urusan luar negeri menekankan bahwa KRG melaksanakan hubungan internasional tanpa melanggar kedaulatan Irak dan tanpa melampaui batas kewenangan eksklusif pemerintah Federal (Dana dan Bakhan, 2016).

Keterlibatan Kurdistan dalam melakukan paradiplomasi diatur menurut Pasal 110, yaitu:

“the federal government shall have exclusive authorities in the following matters: Formulating foreign policy and diplomatic representation; negotiating, signing, and ratifying international treaties and agreements; negotiating, signing, and ratifying debt policies and formulating foreign sovereign economic and trade policy “ (Kurdistan Region Presidency, 2015).

Hal penting lainnya juga disampaikan oleh Talib Rasheed Yadgar, yang merupakan seorang Direktur Jenderal Diwan Kepresidenan di Kepresidenan Wilayah Kurdistan,

“in respect of the ability to implement foreign affairs by the federal regions. As stated by Yadgar, a federal region’s involvement in international relations depends on the legal personality of the region. This means that the regions possess the legal personality in two ways: first, through the efficiency of the region itself to implement the policies, and second, through the constitutional framework. He believes that since Article 117 of the Iraqi constitution stipulates that Kurdistan is a federal region, it can practise foreign relations and be involved in international relations (Dana dan Bakhan, 2016).

8

Dalam pasal 110 juga disebutkan bahwa pemerintah federal memiliki kewenangan eksklusif dalam hal-hal berikut, yaitu pertama merumuskan kebijakan luar negeri dan perwakilan diplomatik; merundingkan, menandatangani, dan meratifikasi perjanjian dan perjanjian internasional; merundingkan, menandatangani, dan meratifikasi kebijakan utang serta merumuskan kebijakan ekonomi dan perdagangan berdaulat luar negeri (Kurdistan Region Presidency, 2015). Sedangkan menurut Pasal 121/4 Wilayah Kurdistan memiliki peran yang signifikan dalam mempraktekkan paradiplomasi, khususnya di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan.

Selanjutnya, dalam kasus perselisihan antara pemerintah daerah Kurdistan dan pemerintah pusat Irak, preferensi wewenang sepenuhnya diberikan kepada Wilayah Kurdistan. Ini merupakan pintu masuk penting bagi kegiatan paradiplomasi. Seperti yang dinyatakan oleh Yadgar sebelumnya bahwa, keterlibatan wilayah federal dalam hubungan internasional tergantung pada kepribadian hukum wilayah tersebut. Artinya daerah memiliki personalitas hukum dalam dua hal: pertama, melalui efisiensi daerah itu sendiri untuk melaksanakan kebijakan, dan kedua, melalui kerangka konstitusional. Ia percaya bahwa karena Pasal 117 konstitusi Irak menetapkan bahwa Kurdistan adalah wilayah federal, ia dapat mempraktikkan hubungan luar negeri dan terlibat dalam hubungan internasional (Dana dan Bakhan, 2016).

Selain itu, pada Pasal 121/4 terdapat pernyataan bahwa pemerintah pusat memberikan kepada daerah hak untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan diplomatik dan kedutaan besar guna menyelenggarakan urusan sosial, budaya, dan pembangunan. Menurut Yadgar, paradiplomasi Wilayah Kurdistan tidak bertentangan atau melanggar kedaulatan Irak atau melampaui batas otoritas eksklusif federal sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya (Yadgar, 2010). Kepala

Perwakilan KRG di Bagdad, Mohammed Ihsan, menegaskan, “ Dalam hal menjalankan hubungan internasional, menurut Pasal konstitusi Irak, sejauh ini apa yang telah dilakukan KRG adalah sah tanpa melanggar kedaulatan Irak ” (Dana dan Bakhan, 2016).

Menurut pasal-pasal konstitusi tersebut, Wilayah Kurdistan memiliki peran yang signifikan dalam mempraktekkan paradiplomasi, khususnya menurut Pasal 121/4 di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan. Selain itu, konstitusi pusat telah memberikan Wilayah Kurdistan yurisdiksi untuk menerapkan perjanjian dan perjanjian internasionalnya sendiri. Hal ini tentu saja logis karena disertai dengan hak untuk menandatangani dan merundingkan perjanjian tersebut, karena proses negosiasi secara realistis tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan internal. Oleh karena itu, Wilayah Kurdistan adalah satu-satunya wilayah federal yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi Irak dan saat ini merupakan satu-satunya wilayah federal yang memiliki karakter internasional dapat menolak suatu keputusan perjanjian yang dianggap tidak memuaskannya (Dana dan Bakhan, 2016). Wilayah Kurdistan relatif makmur dan damai sejak runtuhnya rezim Saddam Hussein. Selain itu, Wilayah ini juga memiliki anggota parlemen Kurdi, menteri, dan presiden saat ini yang juga merupakan seorang Kurdi. Sekalipun Wilayah Kurdistan tidak dapat menjadi negara federal, setidaknya kebijakan KRG dapat memastikan bahwa wilayah Kurdistan tetap menjadi wilayah federal yang kuat dalam federal Irak (Dana dan Bakhan, 2016).

Mekanisme penting lainnya untuk melembagakan paradiplomasi KRG adalah mengadakan perjanjian internasional. Para pemimpin Kurdistan mengakui bahwa perjanjian internasional akan memungkinkan kawasan untuk menegaskan kapasitas internasional dan kepribadiannya untuk masuk ke dalam dan memulai hubungan formal dengan pemain internasional lainnya. Yang pada tahapan selanjutnya, mengadakan perjanjian internasional adalah cara untuk mempromosikan kepentingan kawasan (Dana dan Bakhan, 2016).

Kurdistan kerap menyampaikan bahwa paradiplomasi yang dilakukan oleh Kurdistan sah dan berlandaskan aturan konstitusi. Pemerintah Kurdistan menjadikan konstitusi dan hak otonomi sebagai landasan utama untuk menjalin kerjasama paradiplomasi dengan negara di Timur Tengah. Meskipun menurut ketentuan paradiplomasi Kurdistan hanya dapat dilakukan dalam aspek social, ekonomi, dan pembangunan namun tidak dapat dipungkiri ini telah membuka peluang pengembangan kerjasama yang nyatanya berkembang ke bidang keamanan bahkan bekerjasama dalam memerangi ISIS. Selain itu, sulit membendung intensi dari Kurdistan yang sejak lama merdeka untuk menyusupkan agenda kemerdekaan dengan mencoba meraih dukungan melalui paradiplomasi.

Paradiplomasi Kurdistan dengan Irak, Turki, Iran, dan Suriah

Sejak tahun 2006, Wilayah Kurdistan telah membuat perjanjian dengan beberapa negara, antara lain Korea Selatan, Jerman, Prancis, UEA, Yordania, Qatar, Mesir, Lebanon, Iran dan Turki, serta perusahaan multinasional dan organisasi internasional (seperti UNESCO). Perjanjian tersebut berkaitan dengan beberapa bidang perdagangan, pariwisata, infrastruktur, pendidikan, pertanian, transportasi, minyak dan gas. Selain itu, KRG bersikeras untuk berperan dalam negosiasi perjanjian internasional yang ditandatangani oleh pemerintah federal (Ibid, 2016).

Salah satu bentuk kerjasama atau kontribusi Kurdi untuk Irak adalah peran Kurdi sebagai pasukan terdepan yang menghalau pergerakan ISIS dan menjadi pasukan keamanan yang berperan aktif untuk menjaga keamanan Irak dari serangan pasukan ISIS. Pasukan Kurdi tersebut dikenal dengan sebutan “Peshmerga” yang menguasai hampir semua wilayah berpenduduk Kurdi yang disengketakan yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, termasuk Kirkuk. Saat ini, Peshmerga Kurdi adalah satu-satunya pasukan darat yang efektif memerangi ISIS, yang telah mendapatkan dukungan internasional yang sangat besar. (Dana dan Bakhan, 2016).

Saat Irak runtuh di bawah tekanan yang meningkat dari ISIS, maka Wilayah Kurdistan berada dalam posisi yang baik untuk berdiri bersama dengan komunitas internasional. Selain itu, kontribusi Peshmerga ini juga memungkinkan Kurdi untuk semakin menampakkan diri dan menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional. Falah Mustafa, seorang kepala hubungan luar negeri KRG, menyatakan bahwa:

“Wilayah Kurdistan telah menghabiskan jutaan dolar untuk diplomasi, lebih banyak daripada yang dihabiskan untuk area operasi lainnya. Wilayah Kurdistan berharap dapat mencapai persahabatan dengan negara lain melalui diplomasi, terutama melalui peningkatan hubungan ekonomi dan menjaga keamanan dan stabilitas di Kawasan “ (Dana dan Bakhan, 2016).

Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan keruntuhan rezim Saddam Husain serta aparat keamanan dan militernya telah memicu kebangkitan semangat nasionalis Kurdi. Akibatnya, KRG mulai membentuk kebijakan luar negeri yang lebih rinci dan memperluas hubungannya dengan masyarakat internasional (Sherko, 2017). Dalam menjelaskan hubungan paradiplomasi antara Kurdi dan Turki, Para-diplomasi disini didefinisikan menggunakan definisi Noé Cornago, yaitu “ *as the activities of sub-state governments in international relations through “the establishment of formal and informal contacts, either permanent or ad hoc, with foreign public or private entities, with the aim to promote socio-economic, cultural or political issues* (Noé Cornago, 2010).

Pemerintah Daerah Kurdistan telah beroperasi secara internasional selama lebih dari satu dekade untuk memajukan sektor ekonominya, termasuk bidang sumber daya alam. Keterlibatan KRG secara internasional seperti itu telah menimbulkan perselisihan dengan pemerintah pusat di Bagdad, terutama mengenai ekspor minyak. Data statistik Irak menunjukkan bahwa, “ pada tahun 2003, ekonomi Irak [termasuk Wilayah Kurdistan] sangat melemah di setiap area.” Setelah perubahan rezim di Irak, KRG berusaha membangun ekonomi Kurdistan dengan kemampuannya sendiri. Wilayah ini terkenal dengan cadangan minyaknya yang luas, dan fokus utama kegiatan ekonomi internasional KRG adalah mengembangkan sektor ini. Dimulai dengan perusahaan Turki Genel Enerji pada tahun 2002, KRG mulai menandatangani kontrak dengan berbagai perusahaan minyak, termasuk Chevron, ExxonMobil, Total, Gazprom, dan lainnya, yang semuanya telah membantu untuk memperluas operasi mereka di wilayah tersebut (Sherko, 2017).

Pada tahun 2013, sekitar 50 perusahaan besar dan kecil dari seluruh dunia telah berinvestasi di industri minyak Wilayah Kurdistan. Dan sejak 2011, sebagian besar minyak yang diekstraksi oleh perusahaan asing di kawasan ini telah disalurkan ke pasar dunia melalui Turki. Meskipun Turki dan Kurdistan memiliki ketegangan dalam bidang politik –mengenai keengganan Turki mengakui Kurdi sebagai negara berdaulat, namun peran yang dimainkan Turki dalam sektor minyak Kurdi sangatlah besar. Mengabaikan ketegangan politik dan terus berupaya untuk mendukung ekonomi sendiri, KRG membuat keputusan dengan membuat kontrak ekspor minyak 50 tahun dengan Turki (Sherko, 2017).

Sebuah laporan dari KRG telah menunjukkan peningkatan 60% dalam ekspor minyak ke Turki antara Juni dan November 2014, hal ini menggambarkan upaya ekstensif dan cepat yang telah dilakukan oleh KRG di sektor minyak. Perkembangan sektor perminyakan telah memberikan dampak yang besar bagi Wilayah Kurdistan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Salah satu dampaknya adalah peningkatan taraf hidup di wilayah tersebut. Menurut Maher Aziz, “Pada tahun 2004, pendapatan per kapita KRG 25 persen lebih tinggi daripada wilayah Irak lainnya.” Selain itu, pendirian dua bandara internasional utama di wilayah tersebut, satu di Erbil dan satu lagi di Sulay maniyya, telah juga berkontribusi pada perekonomian KRG (Sherko, 2017).

Selain itu, Iran dan wilayah Kurdistan juga telah memiliki hubungan yang berkembang sejak penggulingan mantan diktator Irak, Saddam Hussein, selama invasi AS tahun 2003 ke negara Muslim itu. Adapun beberapa kerja sama yang dilakukan antara Kurdistan dan Iran meliputi :

- a. Kerja sama pada bidang politik yaitu dibentuknya afiliasi partai politik yang ada di Kurdistan dengan partai politik bentukan Iran yang ada di wilayah Kurdistan yaitu Qarargai Ramazan.
- b. Kembali dibukanya ekspor barang antara Kurdistan dan Iran yaitu melalui kota Qasr-e-Shirin ke wilayah Kurdistan. Dimana sebelumnya kegiatan ekspor diantara kedua negara sempat dihentikan sementara.
- c. Nilai perdagangan antara kedua negara diperkirakan akan melebihi US\$ 4 miliar. (Fars News Agency, 2013)

Sedangkan dengan pemerintah Suriah, Pemerintah Kurdistan memiliki hubungan yang tidak terlalu baik, namun ada beberapa kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membuka kembali kantor penghubung kemanusiaan NES di Dohuk dan mitra KRG di Qamishlo. Kantor penghubung akan memantau situasi pengungsi dan bertukar informasi dengan penyedia bantuan dan layanan kemanusiaan.
- b. Relaksasi pembatasan transfer dana amal ke SEN, yang dibatasi oleh sanksi. Pembatasan yang dilonggarkan akan memungkinkan administrasi SEN untuk mendapatkan lebih banyak pasokan dari sumber-sumber di wilayah tersebut, termasuk KRG.
- c. Memfasilitasi kontak dan kerjasama lintas batas dengan membangun kembali jembatan ponton di Fishkabour dan membuka daerah transit darat lainnya.
- d. Meningkatkan koordinasi antara komite urusan sosial dan kemanusiaan SEN dengan Kementerian Dalam Negeri KRG, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengangkutan pasokan bantuan dan personel.
- e. Melanjutkan dialog kemanusiaan yang melibatkan pejabat kesehatan dari KRG dan SEN. Pejabat senior juga harus berinteraksi lebih teratur (Philips, 2020)

Identitas Pan Kurdi dan Sosialisasi Nilai dalam Perkembangan Paradiplomasi Kurdi

Permintaan akan tuntutan pengakuan identitas bangsa Kurdi telah mendorong KRG untuk semakin aktif menjalankan diplomasi. Sebagaimana Wendt (Wendt, 1999) juga nyatakan bahwa pergeseran penekanan dari kelangsungan hidup fisik/material sebagai aksi kekuatan besar manusia menuju permintaan tuntutan pengakuan subjektivitas (identitas) memiliki konsekuensi yang luas bagi diplomasi. Agar dikenal dan diakui sebagai suatu identitas maka KRG melakukan diplomasi. Paradiplomasi ini juga disambut oleh beberapa negara di Timur Tengah yang merupakan bentuk dari keinginan untuk menciptakan perdamaian.

11

Perjuangan bangsa Kurdi bukanlah perjuangan yang singkat, ia melalui proses yang panjang. Dimulai sejak pasca Perang dunia II, kekalahan militer Kurdi tahun 1975, Perang Irak Iran, serta Perang Teluk I telah membuat bangsa Kurdi semakin kuat. Strategi yang dijalankan juga berubah dari teknik gerilya beralih fokus pada pembentukan state-building bagi bangsa Kurdi (Voller, 2022) atau yang lain menyebutnya sebagai strategi untuk mendapat rekognisi (Palani, 2022).

Pertumbuhan kamp-kamp pengungsi Kurdi di Iran dan Turki sejak lama mengkhawatirkan pemerintah kedua negara ini tentang potensi ketidakstabilan dan penyebaran ide-ide nasionalis Kurdi di antara penduduk Kurdi setempat (Voller, 2022, hlm. 197). Pada saat Amerika mendesak Irak mundur dari Kuwait pada Perang Teluk 1, yang saat itu ditolak oleh Baghdad, menyebabkan koalisi pimpinan AS yang terdiri dari tiga puluh lima negara, termasuk lima negara Arab (Mesir, Arab Saudi, Suriah, Maroko, dan Oman) menyerang pasukan Irak, memaksa mereka untuk mundur dari Kuwait. Keputusan ini menyebabkan rezim Irak mulai kehilangan prestise dan kekuasaannya. Kata-kata Presiden Bush bahwa pertumpahan darah dapat diakhiri dengan pencopotan Hussein yang populer (Tinti, 2021; Voller, 2022) menyebabkan pemberontakan bermunculan di kota selatan Basra, menyebar ke kota-kota lain di selatan, kota suci Najaf dan Karbala, termasuk ke utara. Berbagai kelompok pemberontak ini kemudian menggabungkan diri dengan partai-partai nasionalis Kurdi dan Peshmerga, juga dengan kelompok komunis, Islamis, dan bahkan anggota Partai Pekerja Kurdistan yang berbasis di Turki (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK). Saat itu, dengan cepat, rezim Irak segera kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah di Utara, termasuk kota Kirkuk yang kaya minyak.

Meski kelompoknya menjadi kuat, Kurdi masih menghadapi tantangan dari otoritas Turki dan Iran yang juga khawatir pada ancaman ketidakstabilan yang disebabkan oleh arus pengungsi Kurdi. Hingga lahirlah kebijakan yang dianut oleh pasukan koalisi, adalah menciptakan zona aman, di mana angkatan udara Irak tidak akan bisa terbang (Voller,

2022, hlm. 200). Sadar akan ketidakmampuannya untuk menanggapi secara militer tantangan kedaulatan Irak ini, Hussein beralih ke strategi embargo dan penghentian layanan untuk menekan Kurdi di Irak Utara.

Namun, embargo dan kebijakan Irak ini justru membawa dampak besar pada perjuangan pembebasan Kurdi. Situasi ini dimanfaatkan kepemimpinan Kurdi dan akar rumput untuk berinteraksi dan terlibat dengan komunitas internasional seiring dengan pengungkapan kekejaman Baghdad terhadap Kurdi. Kurdi akhirnya mampu mendapatkan perhatian audiensi yang mereka inginkan. Aktifitas pemimpin Kurdi ini semakin mudah seiring dengan otonomi. Dalam satu contoh awal, bahkan sebelum pembentukan zona aman dan pemerintahan Kurdi, para pemimpin Kurdi seperti Jalal Talabani dari PUK dan Hoshiyar Zebari dari KDP, bersama dengan orang-orang Kurdi yang diasingkan, berpartisipasi dalam konferensi internasional khusus tentang Mempertanyakan Kurdi pada Februari 1991 (Voller, 2022).

Bangsa Kurdi memiliki budaya yang berbeda dari Irak. Budaya ini membentuk identitas dan identitas adalah pusat untuk membentuk preferensi, strategi, dan rasa apa yang pantas dan sah dalam penggunaan kekuatan (Williams, 2013). Persamaan etnis yang dimiliki oleh bangsa Kurdi yang tersebar di Irak, Turki, Iran dan Suriah dalam kasus KRG ini pada satu sisi sebetulnya bisa menjadi hal yang mempersulit paradiplomasi dan memperburuk konflik, namun di sisi lain juga bisa dipandang sebagai hal yang mempermudah jalinan paradiplomasi antara Kurdi dengan negara di Timur Tengah. Isu pemisahan diri akan membuat negara enggan menerima jalinan diplomasi dari KRG karena jika Kurdi merdeka, bukan tidak mungkin wilayah lain di negara selain Irak dimana etnis Kurdi bermukim cukup besar berpeluang semakin bergejolak. Akan tetapi, memilih menjalin kerjasama diplomasi dengan KRG akhirnya tetap dipilih terutama atas pertimbangan mengakomodir Kurdistan dengan baik untuk menjaga sensitifitas dan rasa solidaritas identitas etnis Kurdi yang menyebar di Irak, Iran, Turki dan Suriah agar tidak berbalik mempersulit negara-negara ini. Etnis Kurdi merupakan kelompok mayoritas di wilayah otonomi Kurdistan Irak sekaligus menjadi kelompok minoritas yang signifikan di negara-negara tetangga seperti Iran, Turki, Suriah di mana gerakan-gerakan nasionalis kian berkembang. Negara tetangga inilah yang berkepentingan untuk mengakomodir etnis Turki agar tidak terjadi gejolak di dalam negara.

Kurdi sebagai identitas etnis sudah terhubung sejak lama dengan Timur Tengah. Kurdi merupakan etnis yang besar dan tersebar serta memiliki hubungan sosial yang baik dengan negara di Timur Tengah. Timur Tengah sendiri terdiri dari etnis Arab, Turki, Persia, dan Yahud. Timur Tengah terbentuk dari etnis-etnis ini namun kemudian baru dipecah menjadi berbagai negara pasca Perang Dunia I. Sehingga negara-negara di Timur Tengah sebetulnya belum memiliki satu identitas nasional yang kuat, adapun identitas yang jauh lebih dulu ada dan kuat saat ini tidak mengenal batas negara dan memiliki keterhubungan transnasional yang kuat di seluruh Timur Tengah. Realitas memaksa aktor untuk mengenali mekanisme kausal tersebut (homogenitas, nasib bersama, saling ketergantungan) yang mendorong mereka ke arah bentuk budaya yang lebih tinggi (Wendt, 1999:355).

Munculnya gerakan etnosionalisme Kurdi di negara Irak adalah ketika munculnya perjanjian Sykes-Picott yang dilakukan oleh dua negara yaitu Perancis dan Inggris. Dimana perjanjian ini membagi daerah yang ada di Mesopotamia dan dikarenakan pembagian ini etnis Kurdi menjadi terpecah secara geografis dengan jumlah terbanyak di Irak dan Turki. Dan dari masa itu, Kurdi melakukan gerakan nasionalisme di Irak tahun 1991, perlawanan ini ditunjukkan untuk Inggris agar meratifikasi perjanjian Sevres. Permintaannya adalah meresmikan Kurdistan sebagai satu negara, namun tidak diratifikasi oleh Inggris dikarenakan Kurdistan memiliki sumber daya alam yang melimpah (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013).

Kesamaan identitas Pan Kurdi di satu sisi telah membuat negara di Timur Tengah mempertimbangkan bekerjasama dengan Kurdi seperti yang telah dijelaskan di atas, namun di sisi lain itu juga mampu memberi kekuatan ikatan transnasional dalam perjuangan memerdekakan diri.

Identitas panKurdi inilah yang mengikat keempat bagian pada solidaritas transnasional. Rasa persaudaraan seperti itu menjadi nyata pada saat trauma, seperti yang ditunjukkan oleh reaksi terhadap pengepungan ISIS terhadap para Koban dan ketika KRG mengirim bala bantuan militer untuk melindungi kota terlepas dari antipati dengan koalisi TEV-DEM yang mengatur Federasi Demokratik Suriah Utara (Tinti, 2021).

Selain isu kesamaan etnis ini, ada nilai bersama yang sama dimiliki antara KRG dengan mitra paradiplomasi, terkait kontra terorisme. ISIS menyerang tiga kawasan Kurdi di Suriah utara yang berbatasan dengan daerah kekuasaan mereka. Serangan ISIS di Irak utara Juni 2014 telah melibatkan etnis Kurdi ke dalam konflik. Kurdi seringkali menyatakan nilai anti terorisme yang kemudian diwujudkan lewat komitmen pasukan Kurdi dalam memerangi ISIS. Pemerintahan otonom Wilayah Kurdistan akhirnya turut berpartisipasi mengirimkan pasukan Peshmerga ke daerah yang diabaikan oleh pasukan Irak. Bahkan pada tahun 2014, saat Pesmergha diserang, kelompok otonomi Kurdi di Turki seperti YPG dan PKK serta kelompok etnik Kurdi juga ikut bersama milisi Arab di bawah bendera Syrian Democratic Forces (SDF) turut memberi bantuan dalam serangan ini hingga akhirnya mendapatkan kemenangan dan berhasil mengusir ISIS dari Suriah timur laut, Turki, dan Raqqa yang dianggap sebagai ibu kota ISIS.

Ide lain yang senantiasa menjadi modal paradiplomasi Kurdi adalah demokrasi. Antara tahun 2003 dan 2015, banyak yang menganggap upaya demokratisasi KRI sebagai contoh demokrasi yang baik di Irak, dalam hal pemilihan umum yang relatif adil, hak-hak agama dan etnis minoritas, hak-hak perempuan dan masyarakat sipil lokal yang baru muncul, dan oposisi aktif di parlemen (Palani, 2022). KRG menggunakan kontras praktik demokrasi di Kurdi dengan di Irak sebagai modal dalam praktik paradiplomasi mereka. Dalam berbagai forum internasional KRG menunjukkan tren demokrasi dan pembangunan ekonomi yang tumbuh di Kurdi.

Identitas bangsa Kurdi yang dibawa oleh pemimpin Kurdi adalah suatu komunitas yang demokratis dan toleran. Kampanye yang dipimpin oleh KRG setelah tahun 2003 untuk menarik investasi internasional di Kurdistan, dan yang terpenting, untuk membedakan dirinya dari negara Irak. Para pemimpin Kurdi menggunakan pemerintah Irak yang tidak stabil, lemah dan disfungsi untuk meningkatkan kekuatan de facto mereka, dan mulai menghadirkan wilayah tersebut sebagai 'pusat stabilitas', 'suar toleransi etnis dan agama' dan 'mercusuar harapan' (Palani, 2022, hlm. 62)

Tidak dapat dipungkiri isu minyak memang mendominasi kepentingan negara di Timur Tengah yang mempermudah perkembangan *sovereign* paradiplomasi Kurdi. Namun proses konstruksi melalui sosialisasi yang selalu dibangun Kurdi ini telah menjadi hal yang juga patut diperhitungkan. Perwakilan KRG di pemerintah pusat di Baghdad, terus menyatakan bahwa paradiplomasi Kurdistan adalah sah sesuai pasal-pasal dalam konstitusi dan tidak bertentangan dengan kedaulatan Irak atau otoritas eksklusif federal. Dalam proses intersubjektifitas dan sosialisasi sikap kooperatif yang makin melunak juga kian ditunjukkan oleh KRG. Misalnya di Turki, pada 1978, Abdullah Ocalan mendirikan partai Buruh Kurdi (PKK) dan memperjuangkan negara Kurdi merdeka di Turki. Enam tahun kemudian PKK memulai gerakan bersenjata, dan sejak saat itu 40.000 orang tewas dan ribuan terusir dari kediaman mereka karena konflik ini. Tahun 1990, PKK mengubah tuntutan kemerdekaan menjadi otonomi budaya dan politik, dan meneruskan perjuangan bersenjata. Tahun 2013 kedua pihak mengadakan gencatan senjata. Sikap Kurdi yang mau berkompromi juga masih terlihat pasca referendum tahun 2017 dan pasca bentrok pada 16 Oktober 2017. Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) menghimbau untuk menghentikan operasi militer KRG maupun Irak. Ini kemudian diikuti oleh persyaratan menunda hasil referendum oleh Irak yang kemudian disetujui oleh Kurdistan. Komunikasi dalam jalinan sosialisasi inilah yang turut juga memperkuat jalinan paradiplomasi yang dibangun KRG dengan negara-negara di Timur Tengah. Turki yang mendukung Irak untuk menunda kompromi dan mengusulkan untuk membekukan referendum Kurdistan (Uyanik, 2017) juga ditanggapi kooperatif oleh KRG. Berbagai sosialisasi, sikap kooperatif dan kesamaan nilai inilah yang dibawa Kurdi dalam komunitas internasional.

PENUTUP

Paradiplomasi akan sangat membantu sub-nasional berkembang dan maju bahkan dalam memperjuangkan kemerdekaan sekalipun. Sub-state dengan segala keterbatasannya juga mampu menjadi global player, dan sangat mungkin untuk eksis di kancah internasional. Negara cenderung tertarik pada bidang perdagangan dan ekonomi oleh karenanya dalam hal kasus Kurdi, negara tertarik menyambut kerjasama dalam paradiplomasi Kurdi terutama didorong oleh sumber daya minyak Kurdi. Kepentingan ini menjadi makin kuat karena persamaan ide, sejarah, dan nilai anti terorisme. Faktor kesamaan etnis Kurdi yang juga telah memiliki sejarah hubungan dengan negara di Timur Tengah membuat Kurdi diterima oleh Timur Tengah. Selain itu, Kurdi juga telah cukup lama melakukan sosialisasi mengenai keabsahan paradiplomasi yang mereka jalankan dan menunjukkan sikap kooperatif dengan nilai demokrasi yang diusung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababakr, Y. M. (2020). Iraqi Kurdistan Region: From paradiplomacy to protodiplomacy. *Review of Economics and Political Science*. Iraq: Emerald Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1108/REPS-01-2020-0002>
- Abbas Zadeh, Y., & Kirmanj, S. (2017). The Para-Diplomacy of the Kurdistan Region in Iraq and the Kurdish Statehood Enterprise. *The Middle East Journal*, 71(4), 587–606. <https://doi.org/10.3751/71.4.14>
- Aldecoa, F. and Keating, M. (Eds). (1999). *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*, London: Frank Cass, pp. 40-59.
- Assri, B. C. A. (2021). Konflik Minoritas di Timur Tengah: Studi Kasus Konflik Etnis Kurdi. *Journal Middle East and Islamic Studies*, 8(1).
- Cornago, Neo. (1999), "Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international security: Diminutions of conflict and cooperation", in Aldecoa, F. and Keating, M. (Eds), *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*, Frank Cass, London, pp. 40-59.
- Dana Ali Salih, Bakhan Ako Najmalddin. (2016). Paradiplomacy of the Kurdistan Region after 2003: present and future", *Journal of college of Law for Legal and Political Sciences*, Iraq: University of Sulaimani, 2016.
- Danisworo, Tunggal Ganggas, dkk. (2013). Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Studi Kajian Periode 1979-2012, 2013.
- Dauli, Tito, Ashfar. (2019). Strategi Suku Kurdi Irak dalam Membentuk Pemerintahan Kurdistan Regional Government (KRG) Tahun 2005-2009. Malang: Universitas Airlangga.
- El-Dessouki, A.I. *Paradiplomacy: the international agency of region governments: a comparative study of some regions*, PHD Thesis, Cairo University, Cairo FARS News Agency. 2013. Iraqi Kurdistan: Expanding Trade Cooperation With Iran, 2008. Diakses melalui <https://www.unpo.org/article/15693> pada tanggal 9 Maret 2022
- Guzzini, S., & Leander, A. (t.t.). (2006). *Constructivism and International Relations*. New York: Routledge, 269.
- Klotz, Audie, dan Cecelia Lynch. (2007). *Strategies for Research in Constructivist International Relations*. International Relations in a Constructed World. Armonk, N. Y: M.E. Sharpe, 2007.
- Kurdistan Region Presidency, 2015. Available at: <http://www.presidency.krd/english/contact.asp>
- Kuznetsov, A.S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, London: Routledge, 2015.
- Mingus, M. S. (2006). Transnationalism and Subnational Paradiplomacy: Are Governance Networks Perforating Sovereignty?, *International Journal of Public Administration*, 29(8), 577–594, 2006. <https://doi.org/10.1080/01900690500455305>
- Cornago, Noé. (1999). Diplomacy and Paradiplomacy in The Redefinition of International Security- Dimensions of Conflict and Cooperation. *Regional & Federal Studies*. University of California, 9(1), 20, 1999

- Salih, D. A. and B. A. N. (2016). Paradiplomacy of the Kurdistan Region After 2003: Present and Future. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 53, 2016. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/viewFile/33263/34161>
- Sahide, Ahmad. (2013). Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol.2. No.2. Yogyakarta: Universitas Muhadiyah Jogjakarta. <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0035.139-145>
- Schiavon, Jorge A.(2019). *Comparative Paradiplomacy*. London: Routledge.
- Kirmanj, Sherko. (2017).“*The Para-diplomacy of the Kurdistan Region in Iraq and The Kurdish Statehood Enterprise*”, *The Middle East Journal*, October
- Palani, K. (2022). *Kurdistan’s De Facto Statehood: A New Explanatory Framework* (1 ed.). London: Routledge,. <https://doi.org/10.4324/9781003290704>
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Tinti, Alessandro. (2021). *Oil and National Identity in the Kurdistan Region of Iraq: Conflicts at the Frontier of Petro-Capitalism*. 1 ed. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003161103>.
- Tubilewicz, C., & Omond, N. (2021) *The United States’ Subnational Relations with Divided China: A Constructivist Approach to Paradiplomacy* (1 ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003166429>
- Uyanik, M. *Turkey and the KRG After the Referendum: Blocking the Path to Independence*. Jakarta: CSIS, 2017, November 22. <https://www.csis.org/analysis/turkey-and-krge-after-referendum-blocking-path-independence>
- Phillips, L., David. *Humanitarian Cooperation Between Kurds In Iraq and Syria*, 2020. Diakses melalui <http://www.humanrightscolumbia.org/news/humanitarian-cooperation-between-kurds-iraq-and-syria> pada tanggal 9 Maret 2022.
- Voller, Yaniv. *Second-Generation Liberation Wars: Rethinking Colonialism in Iraqi Kurdistan and Southern Sudan*. 1 ed. New York: Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781009071840>.
- Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Williams, P. D. (2013). *Williams, Paul D. - Security studies: an introduction (2013, Routledge).pdf*. Routledge.